

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilihat dari peran pemerintah serta partisipasi masyarakat, berdasarkan temuan dan analisis yang penulis telah kemukakan dalam penelitian ini menyoroti dinamika politik pengelolaan sampah yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan dilaksanakan. Adapun melalui kesimpulan ini, penulis akan memberikan gambaran bagaimana peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok.

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Depok No 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah merupakan keinginan dan kesadaran politik pemerintah untuk menanggulangi masalah sampah yang terjadi di Kota Depok. Kebijakan ini melahirkan program-program untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Inovasi program pada pemerintahan Mohammad Yasin cukup banyak diantaranya pembentukan bank sampah, Depok Zero Waste City, RW memilah, Gerakan ember, program adiwiyata, terbitnya Peraturan daerah no 13 tahun 2018 pembaruan atas poin retribusi warga, maggot pemakan sampah, optimalisasi UPS, dan Team Patroli Penindakan Pelanggar Sampah. Implementasi Peraturan Daerah Kota Depok No 13 Tahun 2018 dalam pengelolaan sampah di Kota Depok, pemerintah mengerahkan upaya serta bekerja sama antar birokrasi pemerintah daerah untuk mensosialisasikan terkait pemilahan, pengelolaan dan penanganan sampah bagi masyarakat, namun sosialisasi yang belum maksimal kepada masyarakat, minimnya sarana prasarana armada pengangkut sampah, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah dengan benar.

Berdasarkan Variabel content of policy dan context of policy dari Marilee S ,Grindle penulis menggunakan indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh indikator indikator Influenced

interests (kepentingan yang mempengaruhi), Types of benefits (jenis manfaat yang diperoleh), The degree of change to be achieved (derajat perubahan yang diinginkan) dan Level of compliance and response from implementers (Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) dan The power, interests and strategies of the actors involved (Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat). Variabel ini merupakan faktor penting yang penulis analisis untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah serta partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah. adapun dengan menggunakan studi kasus dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok, penulis menganalisis peran dari pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok serta Sekretaris Daerah. Ada juga peran dari aktor non-pemerintah yakni masyarakat yang terdiri dari Bank Sampah Induk Rumah Harum serta Ketua RT Cipayung Depok. Analisis data di atas dengan menggunakan teori Grindle akan menyoroti sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target masyarakat, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, dan apakah para actor sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Berikut adalah analisis Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok dapat dilihat dari pandangan Merilee S. Grindle. Berdasarkan dimensi isi kebijakan (Content of Policy) pada indikator Kepentingan yang mempengaruhi (Influenced interests) hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan yang mendorong untuk pelaksanaan kebijakan berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti masih banyak nya pembuangan sampah secara liar serta tidak ada aturan yang mengikat tentang retribusi sampah sehingga masyarakat menjadi kurang peduli akan pentingnya pengelolaan sampah. Dan pengaruh kebijakan terhadap masyarakat belum sepenuhnya terlaksana karena masyarakat masih kurang peduli terhadap sampah khususnya dalam hal memilah sampah, kemudian angka persentase keikutsertaan masyarakat dalam Bank Sampah juga jauh dari target yang seharusnya.

Kemudian berdasarkan indikator Jenis manfaat yang diperoleh (Types of benefits), penelitian ini menunjukkan bahwa Manfaat yang diperoleh masyarakat sudah dirasakan namun belum berhasil sepenuhnya, dapat dilihat bahwa pada program optimalisasi Bank Sampah dimana masyarakat merasa terbantu serta adanya peningkatan ekonomi walaupun tidak signifikan dan dengan adanya Perda No 13 Tahun 2018 ini sistematis pengangkutan dalam hal retribusi menjadi lebih teratur namun masih ditemukannya warga yang tidak membayar retribusi sehingga sampah dibuang ke sembarang tempat secara ilegal dengan di buang ke Sungai atau dibakar.

Selanjutnya dilihat dari indikator Derajat perubahan yang diinginkan (The degree of change to be achieved), penelitian ini menjelaskan bahwa Tingkat perubahan yang terjadi dalam masyarakat juga belum terlihat signifikan. Target capaian berdasarkan PerWal No 65 Tahun 2018 belum sepenuhnya mencapai target keberhasilan dalam 2 aspek yaitu penanganan dan pengurangan sampah. Timbulan sampah akibat masyarakat membuang sampah sembarang masih tetap ada di beberapa titik di Kota Depok berdasarkan observasi penulis. Implementasi kebijakan perlu didukung oleh sumber yang mendukung agar implementasi berhasil dan terlaksana dengan baik, faktor lain yaitu sarana dan prasarana yang ada di Kota Depok belum optimal yang mana belum adanya tempat pembuangan sampah sementara di setiap RT/RW dan juga ketersediaan sarpras masih terbatas, untuk saat ini baru hanya memiliki 120 armada tidak sebanding dengan 2,1 juta jiwa masyarakat di Kota Depok. Sementara salah satu keberhasilan yang cukup terlihat yaitu adanya peningkatan jumlah nasabah Bank Sampah, hal itu menunjukkan masyarakat mulai mempunyai kesadaran akan pentingnya pengeelolan sampah yang baik sesuai aturan.

Ditinjau dari dimensi Lingkungan Kebijakan (Context of Policy) pada indikator Tingkat kepatuhan dan adanya respon pelaksana (level of compliance and implementation response), penelitian ini menunjukkan bahwa Pada Tingkat kepatuhan dan respon pelaksana pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam program Zero Waste City di Kota Depok, Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok mempunyai rasa komitmen dengan

menjalankan program yang ditetapkan namun hasil belum optimal dalam menjalankan program yang direncanakan, berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa beberapa program yang dijalankan tidak optimal, salah satunya yaitu program zero waste city yang menargetkan pada tahun 2021 Kota Depok terbebas dari masalah sampah namun data lapangan menunjukkan masih banyak terjadinya masalah sampah salah satunya masih adanya pembuangan sampah liar di beberapa titik kota Depok serta permasalahan TPA Overload yang yak kunjung selesai. Kemudian respon para pelaksana kebijakan sangat mendukung program ini dan didominasi oleh respon positif dikarenakan program ini mempunyai tujuan untuk kebaikan bersama guna menciptakan Kota Depok yang bebas dari sampah. Namun berdasarkan penelitian menunjukkan kinerja para petugas yang belum optimal berjalan sesuai dengan arahan pemerintah yang mengacu pada rencana induk pengelolaan sampah di Kota Depok.

Selanjutnya ditinjau dari indikator Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Hasil observasi peneliti lapangan menunjukkan kurang adanya political will atau kemauan politik dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok sebagai implementor kebijakan pengelolaan sampah ini dalam melakukan sosialisasi, hal tersebut karena dampak yang dirasakan setelah dilakukan program sosialisasi kurang berdampak baik, sebagian masyarakat masih tidak mau melakukan pemilahan sampah hingga kerap melakukan pembuangan sampah secara liar, seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok membuat strategi yang konkrit agar program tersebut tepat sasaran dan juga faktor tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi dalam respon sosialisasi, serta kurangnya sosialisasi secara masif serta menyeluruh ke semua elemen masyarakat, ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya sosialisasi terhadap masyarakat kurang, masyarakat hanya tahu dari laporan ketua RT mengenai informasi pengelolaan sampah di daerah masing-masing melalui informasi dari lurah setempat.

Studi kasus peneliti pada TPS di Pasar Kemiri, Depok bahwa terjadi Tarik menarik kepentingan, dan kepentingan pemerintah kalah sehingga

kepentingan yang dimiliki masyarakat tidak dapat diupayakan untuk sampah dikelola pemerintah, serta adanya oknum masyarakat yang memintai bayaran sampah tetapi dia tidak membayarkannya sebagai retribusi sampah ke petugas kebersihan, hal ini karena kurang adanya kemauan politik dari pemerintah untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dilihat dari teori Cohen dan Uphoff pada indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan, berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pemerintah tidak melibatkan kepentingan masyarakat dalam perumusan kebijakan, menurut PerDa no 13 tahun 2018 dimana pemerintah dalam perancangan kebijakan wajib mengikutsertakan elemen masyarakat, diskusi yang tertuang dalam PerDa tersebut hanyalah dari sisi pemerintah saja sehingga manfaat yang dirasakan kurang berdampak luas bagi seluruh masyarakat di Kota Depok.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi Perda No.13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan sampah di Kota Depok belum berjalan dengan optimal, faktor penyebab belum efektifnya Perda No. 13 Tahun 2018 antara lain:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok sebagai pelaksana kebijakan Perda No. 13 Tahun 2018 belum optimal dalam menjalankan kebijakan yang seharusnya sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, terdapat kendala yang terjadi di lapangan antara lain, sosialisasi Pengelolaan sampah rumah tangga tidak merata ke seluruh masyarakat, kurangnya fasilitas Tempat Penampungan Sementara yang jaraknya dekat lingkungan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah yang terpadu, permasalahan TPA yang tidak kunjung selesai dan kurangnya kemauan politik pemerintah dalam menggalakan program kepada masyarakat dinilai hanya bersifat tindakan preventif saja melalui sosialisasi. Namun dari sisi keberhasilan implementasi pemerintah sudah menjalankan salah satu fungsinya dalam hal mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan sampah, pemerintah membuka peluang kepada masyarakat atau swasta dalam program pengelolaan sampah berbasis teknologi (RDF) untuk bekerja sama, walaupun dalam perumusan

kebijakan masyarakat tidak diikuti sertakan untuk musyawarah bersama dengan elit politik lainnya.

2. Partisipasi masyarakat masih rendah dalam pengelolaan sampah rumah tangga karena sudah terbiasa menerapkan sistem kumpul, angkut dan buang sampah tanpa melalui proses pemilahan membuat timbulan sampah di Depok terus meningkat setiap tahunnya serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan seperti halnya memilah sampah sebelum dibuang serta pemanfaatan bank sampah sebagai tempat pendaur ulang sampah dan mempunyai dampak baik dari sisi ekonomi, serta sikap tidak peduli sebagian masyarakat terhadap pengelolaan sampah menjadi penghambat keberhasilan kebijakan.

V.2 Saran Praktis

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok lebih meningkatkan sistem pengelolaan sampah tidak hanya di tingkat Kecamatan tetapi pada tingkat Kelurahan bahkan RT/RW.
2. Sumber daya manusia yang bertugas di UPS harus diberikan perhatian lebih oleh Dinas Lingkungan hidup, dengan tujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi untuk melakukan pengelolaan sampah di UPS.
3. Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah pada tingkat RT/RW harus lebih sering dilakukan dan segera diberi fasilitas pendukung seperti bantuan pembentukan bank sampah di setiap lingkungan RT/RW.
4. Pengadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang lokasinya dapat terjangkau oleh masyarakat dan memberikan himbauan kepada ketua RT/RW untuk mengadakan pengelolaan sampah secara merata ke seluruh penduduk di wilayahnya.
5. Penjagaan di tempat pembuangan sampah liar secara berkala untuk memberikan sanksi pada setiap masyarakat yang melanggar Perda No.13 Tahun 2018 Pasal 57 ayat (1) dan (3). Agar masyarakat sadar akan kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah Kota Depok.
6. Percepatan program pengelolaan sampah berbasis teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), revitalisasi TPA Cipayung serta dibukanya TPA Lulut Nambo, maka permasalahan sampah di Kota Depok akan tuntas.

V.2.1 Saran Teoritis

1. Berkontribusi dengan memberi sumbang penelitian lainnya terhadap ilmu kebijakan publik, seperti perumusan masalah ditinjau dari aspek Birokrasi dan Public Governance.
2. Peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelaahan lebih mendalam pada sektor anggaran dari teori implementasi kebijakan yang ada. Sehingga hasil dan pembahasan lebih mendalam. Peneliti menyadari bahwa metode dan cara penelitian lain akan lebih memberikan aspek kebermanfaatan maupun aspek perkembangan terhadap hasil penelitian. Sehingga metode lain seperti kuantitatif akan memberikan pandangan baru pada hasil implementasi kebijakan dengan menampilkan output berupa feedback masyarakat terhadap kebijakan yang telah dijalankan.

V.3 Kekurangan Penelitian

Penelitian ini dirasa masih bersifat general, fokus dari penelitian bisa ditinjau dari satu aspek agar mempunyai kajian lebih mendalam pada satu sisi tersebut.